JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

Menggali Konsep Demokrasi Santun: Tinjauan Literatur dalam Konteks Kepemimpinan Prabowo Subianto

Chika Anindita[1,*], Chysara Rabani [2], Raisa Rahma Rizkia[3], Wahyu Eka M. A. Arianto[4]
Institut Teknologi Bandung, Jln. Ganesa, Bandung, Jawa Barat 40132, Indonesia

[1] 12122084@mahasiswa.itb.ac.id *; [2]12122051@mahasiswa.itb.ac.id; [3]10322052@mahasiswa.itb.ac.id; [4]12122060@mahasiswa.itb.ac.id

Informasi Artikel
Received:
16/01/2025
Accepted:
26/04/2025

ABSTRAK
"Demokrasi santun" menjadi konsep yang penting dalam politik Indonesia, terutama setelah banyak dibahas dalam pidato-pidato Prabowo Subianto. Konsep ini menekankan pentingnya etika, dialog terbuka, dan saling menghargai dalam berpolitik. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan memahami makna demokrasi santun serta melihat bagaimana penerapannya bisa mengurangi konflik politik. Dengan metode kajian literatur, penelitian ini menganalisis berbagai tulisan akademik dan pidato terkait untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi santun dan mengapa penting bagi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi santun berpotensi meredam konflik politik dan sosial, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terhadap pembatasan kebebasan berpendapat dan kembalinya praktik otoritarianisme. Dominasi militer dalam kabinet dan pengaruh oligarki dalam kebijakan memperkuat kekhawatiran ini. Oleh karena itu, penerapan demokrasi santun harus diimbangi dengan perlindungan hak-hak sipil, penguatan mekanisme *checks* and *balances*, dan partisipasi publik yang aktif. Penelitian ini menambah pemahaman tentang demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai kepemimpinan yang mengedepankan etika. Hasil penelitian ini diharapkan bisa mendorong terciptanya budaya demokrasi yang lebih toleran dan harmonis, serta bermanfaat bagi stabilitas politik di Indonesia.

Kata kunci : Demokrasi Santun, Prabowo Subianto, Kepemimpinan, Etika Politik

ABSTRACT
"Civilized democracy" has become an important concept in Indonesian politics, especially after being frequently discussed in Prabowo Subianto's speeches. This concept emphasizes the importance of ethics, open dialogue, and mutual respect in political practices. This research aims to explore and understand the meaning of civilized democracy and examine how its application can help reduce political conflicts. Using a literature review method, this study analyzes various academic writings and related speeches to explain what civilized democracy entails and why it is significant for Indonesia. The findings reveal that while civilized democracy has the potential to mitigate political and social conflicts, it also raises concerns about restrictions on freedom of speech and the resurgence of authoritarian practices. The dominance of the military in the cabinet and the influence of oligarchs in policymaking further reinforce these concerns. Therefore, the implementation of civilized democracy must be balanced with the protection of civil rights, strengthened checks and balances mechanisms, and active public participation. This research contributes to a deeper understanding of democracy in Indonesia, particularly leadership that prioritizes ethics. The findings are expected to encourage the development of a more tolerant and harmonious democratic culture, benefiting Indonesia's political stability.

Keywords: *Polite Democracy, Prabowo Subianto, Leadership, Political Ethics*

JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

Copyright © 2025 (Chika Anindita, Chysara Rabani , Raisa Rahma Rizkia, Wahyu Eka M. A. Arianto). All Right Reserved

How to Cite: Anindata, C., Rabani, C., Rizkia, R.R., and Arianto, W.E.M.A. (2025). Menggali Konsep Demokrasi Santun: Tinjauan Literatur dalam Konteks Kepemimpinan Prabowo Subianto. Jurnal Ilmiah Mimbar Demorasi. 24(2). 521-525. DOI. 10.21009/jimd.v24i2.53126

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Demokrasi santun merupakan konsep yang menekankan pada praktik demokrasi yang menjunjung tinggi etika, moralitas, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Dalam konteks kepemimpinan Prabowo Subianto, konsep ini menjadi relevan untuk dianalisis karena gaya kepemimpinannya yang dinilai memiliki karakteristik tegas namun tetap berusaha mengedepankan nilai-nilai kebangsaan (Siregar, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana demokrasi santun dapat diimplementasikan dalam kepemimpinan Prabowo Subianto, serta sejauh mana konsep tersebut relevan dalam dinamika politik Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang praktik demokrasi di Indonesia. Wijayanti (2019) mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kebebasan berpendapat dan toleransi. Penelitian lain oleh Lestari (2021) menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat seringkali diwarnai oleh polarisasi yang tajam. Namun, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik membahas bagaimana konsep demokrasi santun diterapkan dalam konteks kepemimpinan tokoh politik tertentu. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi.

Selain itu, penelitian oleh Rahman (2020) menyoroti pentingnya etika politik dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, pendekatan yang digunakan masih bersifat umum dan belum menyoroti praktik konkret dalam kepemimpinan nasional. Demikian pula, studi oleh Putri (2022) lebih berfokus pada dinamika politik elektoral tanpa mengkaji lebih dalam mengenai penerapan nilai-nilai kesantunan dalam berpolitik. Oleh karena itu, masih diperlukan kajian yang lebih spesifik terkait penerapan demokrasi santun dalam kepemimpinan Prabowo Subianto.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai demokrasi santun dalam konteks kepemimpinan Prabowo Subianto masih belum banyak dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana konsep demokrasi santun diimplementasikan dalam gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dan relevansinya dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur untuk meninjau konsep demokrasi santun dalam konteks kepemimpinan Prabowo Subianto. Subjek penelitian berupa dokumen dan literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian terkait. Data dikumpulkan melalui telaah sistematis terhadap sumber-sumber yang dipilih berdasarkan kesesuaian dengan topik. Analisis data dilakukan dengan cara menyintesis informasi untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.

Hasil dan Pembahasan

Gagasan “demokrasi santun" yang diajukan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikannya pada 20 Oktober 2024 bertujuan menciptakan stabilitas politik dengan meredakan perpecahan yang semakin tajam di masyarakat. Prabowo menekankan pentingnya dialog terbuka yang mengutamakan kesopanan dalam menyikapi perbedaan pendapat. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap ketegangan politik yang semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pemilu yang memicu perpecahan. Konsep ini mengajak masyarakat untuk mempraktikkan nilai-nilai demokrasi secara bertanggung jawab, tanpa melibatkan tindakan atau ujaran yang berpotensi memecah belah. Dalam konteks sosial-politik Indonesia, makna demokrasi santun dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk meredakan ketegangan politik yang

JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

sering kali muncul**.** Meskipun pendekatan ini tampak dapat menciptakan suasana politik yang lebih damai, terdapat kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kebebasan berpendapat dan ruang untuk kritik dalam demokrasi. Penekanan pada kesantunan bisa berpotensi membatasi kebebasan masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuan, yang menjadi esensi demokrasi itu sendiri. Ketika kebebasan untuk mengkritik pemerintah atau kebijakan dibatasi demi menjaga kedamaian, demokrasi yang sehat bisa terancam. Oleh karena itu, meski "demokrasi santun" menawarkan suasana politik yang lebih harmonis, harus ada jaminan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berpendapat dan partisipasi aktif masyarakat, tetap terjaga.

Di satu sisi, demokrasi santun menawarkan potensi untuk meredam konflik politik dan sosial yang sering kali menjadi penghambat stabilitas nasional. Dengan suasana yang lebih kondusif, pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan tanpa gangguan dari pertikaian politik yang berlarut-larut. Namun, di sisi lain, pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa gagasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Beberapa pengamat, termasuk Yance Arizona dari Universitas Gadjah Mada, mencatat bahwa narasi serupa pernah digunakan pada masa Orde Baru untuk melegitimitasi otoritarianisme atau memberikan pembenaran dan alasan yang membuat sistem pemerintahan otoriter (di mana satu pihak atau kelompok menguasai segalanya) terlihat sah atau diterima oleh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menunjukkan bahwa tindakan-tindakan otoriter tersebut perlu dilakukan demi kebaikan atau keamanan bersama, meskipun sebenarnya kebebasan rakyat dibatasi. Jika tidak diiringi dengan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi, demokrasi santun justru dapat mengarah pada konsolidasi kekuasaan yang mengancam pluralisme politik.

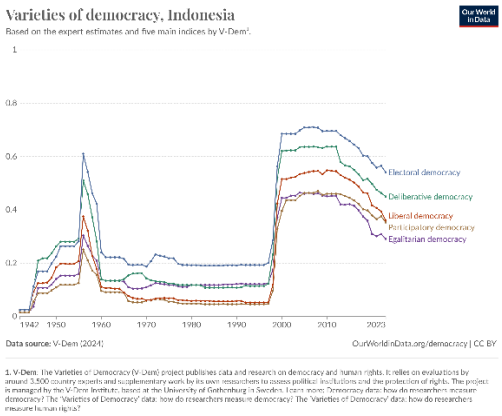

Sumber: The Economist Intelligence Unit (EIU) via Our World in Data (2023)

Gambar 1. Macam-Macam Demokrasi di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, kemunduran demokrasi di Indonesia semakin terasa, seperti yang dilaporkan oleh The Economist Intelligence Unit yang mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan "demokrasi cacat" (*flawed democracy*) pada 2024. Selain itu, lembaga Freedom House menilai Indonesia sebagai negara "bebas sebagian" akibat penurunan dalam kebebasan berekspresi, independensi media, dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Beberapa langkah dari pemerintahan Prabowo, termasuk dominasi mantan perwira militer dalam kabinet dan revisi undang-undang yang memperluas peran militer, menambah kekhawatiran akan kemunduran demokrasi yang sudah ada. Langkah-langkah ini sering dipandang sebagai upaya untuk memperkuat kontrol negara yang berisiko mengembalikan elemen-elemen pemerintahan otoriter di balik kedok demokrasi. Hal ini mengingatkan pada periode sebelum reformasi, di mana militer memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia, yang berpotensi menggerus fondasi demokrasi substantif yang selama ini telah diperjuangkan.

Selain itu, tantangan utama lainnya adalah dominasi oligarki dalam pengambilan kebijakan yang sering kali mengutamakan kepentingan elite ekonomi dan politik. Pemerintah cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan oligarki dibandingkan dengan aspirasi masyarakat luas. Minimnya transparansi dalam proses legislasi semakin memperburuk situasi ini dan menjadikan masyarakat hanya sebagai penonton dalam keputusan-keputusan penting. Fenomena ini mencerminkan lemahnya institusi demokrasi yang seharusnya

menjamin keterwakilan dan partisipasi publik secara bermakna. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat semakin mempersempit ruang publik dan melemahkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Langkah-langkah pemerintah, seperti pelatihan militer untuk pejabat sipil dan revisi kebijakan terkait peran militer, memperlihatkan tren meningkatnya kontrol terhadap ruang sipil. Penguatan peran militer ini menimbulkan kekhawatiran terkait pembatasan kebebasan berekspresi, ruang oposisi politik, dan suara kritis dari masyarakat sipil. Keberadaan mantan perwira militer dalam kabinet mempertegas kembalinya militerisme dalam politik sipil, yang bertentangan dengan semangat reformasi. Jika tidak diawasi dengan mekanisme *checks and balances* yang kuat, langkah ini dapat memperburuk situasi dan membawa Indonesia ke arah otoritarianisme yang terselubung. Oleh karena itu, pengawasan publik dan partisipasi aktif masyarakat menjadi krusial dalam menjaga demokrasi tetap sehat.

Meskipun demikian, peluang untuk memperbaiki situasi masih terbuka. Penguatan mekanisme *checks and balances* menjadi langkah utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam kondisi di mana mayoritas partai politik mendukung pemerintah. Partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan juga perlu diupayakan untuk menjaga legitimasi pemerintahan. Kebebasan sipil harus dijamin agar masyarakat dapat terus mengawasi dan memberikan kritik yang konstruktif. Konsep demokrasi santun hanya akan efektif jika disertai dengan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Dengan demikian, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan institusi demokrasi untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara demokrasi yang inklusif dan substantif sesuai dengan cita-cita reformasi.

Selain adanya interpretasi yang mengatakan bahwa demokrasi santun dapat mengurangi hakikat dari demokrasi itu sendiri, perlu diperhatikan pula apabila dilihat dari sisi lainnya, demokrasi santun ini dapat dikatakan memiliki tujuan untuk menciptakan suasana politik yang lebih damai dengan menghindari praktik politik yang penuh konfrontasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun budaya diskusi yang sehat, di mana perbedaan pendapat dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan sebagai ancaman. Dalam hal ini, penerapan demokrasi santun membutuhkan kesadaran dari semua pihak baik pemerintah, politisi, maupun masyarakat untuk menghindari provokasi dan mendukung penyelesaian masalah melalui musyawarah. Penerapan demokrasi santun dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi konflik politik melalui beberapa langkah strategis. Pertama, demokrasi santun mendorong dialog terbuka yang berbasis data dan fakta, di mana pihak-pihak yang berkepentingan harus menyampaikan argumen yang didukung oleh data valid serta menghindari retorika yang bersifat menyerang pribadi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas diskusi politik, tetapi juga membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda. Selain itu, memperkuat pendidikan politik berbasis nilai-nilai demokrasi juga menjadi kunci penting dalam membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Dengan meningkatkan literasi politik, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dan konstruktif tanpa memicu konflik horizontal. Langkah berikutnya adalah membangun kepercayaan melalui transparansi, karena ketidakpercayaan terhadap institusi dan proses politik sering kali menjadi sumber konflik. Dengan menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan akuntabilitas, pemerintah dapat meminimalkan ruang bagi spekulasi dan kecurigaan publik. Demokrasi santun juga mengutamakan cara penyelesaian masalah yang baik melalui percakapan dengan memberi kesempatan bagi semua orang untuk berbicara dan berbagi pendapat mereka. Tujuannya agar semua pihak bisa mencapai kesepakatan tanpa menimbulkan perpecahan atau konflik di masyarakat. Terakhir, pembentukan norma sosial yang mengedepankan kesantunan dalam berpolitik menjadi elemen penting dalam penerapan demokrasi santun. Hal ini membutuhkan contoh dari para pemimpin dan figur publik yang menunjukkan sikap santun dan menghormati perbedaan pendapat, sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap perilaku masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Konsep demokrasi santun yang diajukan Presiden Prabowo Subianto menawarkan pendekatan baru dalam meredakan konflik politik di Indonesia melalui dialog terbuka yang menekankan kesopanan dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Pendekatan ini memberikan inovasi dalam wacana demokrasi dengan mengutamakan stabilitas sosial-politik tanpa mengabaikan dinamika demokrasi. Namun, implementasi demokrasi santun memerlukan keseimbangan yang hati-hati agar tidak membatasi kebebasan

berekspresi yang merupakan esensi demokrasi. Penelitian ini mempertegas pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan penerapan konsep ini tidak mengarah pada pembatasan kritik atau konsolidasi kekuasaan. Sebagai saran, penelitian lanjutan dapat lebih mendalami mekanisme penerapan demokrasi santun yang efektif, termasuk strategi melibatkan masyarakat sipil untuk memastikan nilai-nilai demokrasi tetap terjaga dalam praktik politik sehari-hari.

Referensi

Lestari, D. (2021). Polarisasi Politik di Indonesia: Sebuah Tantangan Demokrasi. *Jurnal Ilmu Politik*, *15*(2), 45–60.

Putri, A. (2022). Dinamika Politik Elektoral dan Tantangan Demokrasi Santun. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, *18*(1), 75–89.

Rahman, B. (2020). Etika Politik dalam Penguatan Demokrasi Indonesia. Jurnal Etika dan Politik. *Jurnal Etika Dan Politik*, *10*(3), 120–135.

Siregar, H. (2020). Kepemimpinan Prabowo Subianto dalam Konteks Politik Nasional. *Jurnal Kepemimpinan Dan Politik*, *8*(1), 15–30.

Wijayanti, R. (2019). Kebebasan Berpendapat dan Toleransi dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, *12*(4), 88–102.

Hendrik Yaputra, & Loppies, S. N. (2024, October 21). *Ancaman Demokrasi di Rezim Prabowo*. Tempo. https://koran.tempo.co/read/nasional/490352/ancaman-demokrasi-di-rezim-prabowo